

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie, Habib., 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur., 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika*, UII press, Yogyakarta.
- Amrani, Hanafi., 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang, Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang Modus-Modus pencucian Uang*, Setara Press, Malang.
- Hiariej, O.S, Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husein, Yunus., 2018, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq., 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kie, Tan Thong., 2000, *Studi Notariat: Serba-serbi Praktek Notariat*, Buku I, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Kristiana, Yudi., 2015 *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta.
- Pardede, Marulak., 1995, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto., 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Saputro, Anke Dwi., 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Setiawan, Wawan., 2004, *Notaris Profesional*, Media Notariat.
- Sjahdeini, Sutan Remy., 2007, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suryana, Ida Rosita., 1999, *Serba-serbi Jabatan Notaris*, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5846

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1896

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087

C. Jurnal

Made Dermawan, 2017, “Perlindungan Hukum bagi Notaris Atas Tindak Pidana
Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya” *openjournal.unpam.ac.id*
diakses pada tanggal 11 November 2019, pukul 19.10 WIB.

Elisabeth, 2019, “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai
Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Memiliki Kewajiban
Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”
https://jurnal.usu.ac.id, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019, pukul 14.40 WIB.

Bana, Adnan Sah., Artikel: “Nasib RUU Pertanahan & Jabatan PPAT” *Renvoi*,
Nomor 10.190.XV Maret 2019, Yogyakarta.

D. Tesis

Istihara, 2019, “Kewajiban Notaris/PPAT Dalam Mengikuti Registrasi Pada Aplikasi
Gathering Report Information Processing System (GRIPS) Untuk Melaksanakan
Pelaporan Sesuai Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016”, *Tesis*,
Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

Risa Kristiyana, 2017, “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana
Pencucian Uang”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas
Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Atika Riyanto, 2017, “Penetapan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Tindak Pidana
Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Tesis*,
Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. Internet

Cegah TPPU, Advokat, Notaris, Hingga Akuntan Diminta Laporkan Ke PPAK
<https://news.detik.com/berita/d-3817997/> diakses pada 26 Agustus 2019, Pukul
14.53.

Diah Sulistyani Muladi, “Kenapa Notaris Harus Peduli GRIPS”
<https://nusantarapos.co.id/opini/8049/07/03/2019/> diakses pada tanggal 26
Agustus 2019, pukul 14.13 WIB.